

SINOPSIS

Provinsi Bangka Belitung terutama Kabupaten Belitung memiliki keinginan untuk mengembangkan pariwisata yang ada untuk menjadi sektor unggulan, melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2015 - 2025 (RIPPARDA) digunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan mengembangkan sektor pariwisata secara terstruktur, terpadu dan memiliki wawasan pembangunan berkelanjutan serta sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kegiatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer yaitu wawancara dengan pihak terkait yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, pihak Swasta (BCA) dan masyarakat Desa Wisata Terong, Belitung. serta data sekunder yaitu informasi bersumber dari internet.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengelolaan desa wisata yang melibatkan beberapa stakeholder, yang ditinjau dari perspektif *collaborative governance* dengan menggunakan konsep Ansell And Gash yaitu kolaborasi di pengaruhi oleh *starting condition*, kepemimpinan fasilitatif, *desain institutional* dan kemudian proses kolaborasi dalam Tata Kelola Desa Wisata Terong berbasis masyarakat yaitu dengan adanya *face to face* (dialog tatap muka), *trust building* (saling kepercayaan), *commitment to process* (komitmen terhadap proses) dan *share understanding* (pemahaman bersama).

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Tata Kelola Desa Wisata Terong, proses tersebut dimulai dengan *Starting Condition* atau tahap awal yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat melakukan kolaborasi di karenakan mempunyai tujuan yang sama yaitu dalam mendukung sektor pariwisata. Kepemimpinan fasilitatif dalam hal ini pemerintah yang berperan sebagai aktor utama yaitu memfasilitasi para stakeholder, sedangkan kepemimpinan swasta dalam kolaborasi yaitu berperan sebagai pembina dalam program yang mereka laksanakan. *Desain institutional* dalam kolaborasi ini yaitu untuk pemerintah dengan stakeholder tidak ada aturan yang mengikat namun saling terbuka sedangkan untuk swasta dan masyarakat terdapat aturan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama. Proses kolaborasi dalam tata kelola Desa Wisata Terong dijalankan oleh semua aktor kolaborasi sudah berjalan dengan baik dengan adanya dialog tata muka bersama pada saat melakukan kolaborasi kemudian adanya saling kepercayaan dan komitmen yang dibangun dari masing-masing stakeholder dalam proses kolaborasi, serta adanya sikap saling memahami yang terjalin antara stakeholder dalam proses kolaborasi Tata Kelola Desa Wisata Terong

Kata Kunci : Desa Wisata, Collaborative Governance